

LAPORAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BAPPENAS

Oleh:
Ginandjar Kartasasmita

**Disampaikan pada Kunjungan Kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Di Bappenas
Jakarta, 29 Oktober 1997**

Bapak Wakil Presiden yang kami hormati,
Yang terhormat Saudara-saudara Menteri dan Ketua LPND,
Bapak-bapak dan Ibu, serta para hadirin yang kami hormati.

Dalam rangka kunjungan kerja Bapak Wakil Presiden ke Bappenas, perkenankan kami menyampaikan laporan sebagai berikut:

1. Dalam gedung ini kami bertanggung jawab atas “dua organisasi”, yang satu sama lain berbeda tetapi erat kaitannya, yakni sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional menurut Keppres Nomor 44 tahun 1993, kami bertugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan mengkoordinasikan kegiatan operasional Bappenas. Sebagai Ketua Bappenas tugas kami antara lain adalah menyusun rencana-rencana pembangunan nasional untuk jangka panjang, jangka sedang, maupun jangka pendek, dan menyusun RAPBN bersama dengan Departemen Keuangan.

2. Sebagai Menteri Negara PPN, kami dibantu oleh seorang Sekretaris Menteri (Sesmen), 5 orang Asisten Menteri (Asmen), dan 5 orang Staf Ahli Menteri (Samen). Sedangkan sebagai Ketua Bappenas kami dibantu oleh seorang Wakil Ketua, dan 8 orang Deputi yang membawahi 33 Biro, dan 2 Pusat. Sesmen kami merangkap sebagai Deputi Administrasi Bappenas, dengan demikian dari segi pelayanan, ada kesatuan dan menghindari tumpang tindih serta memelihara efisiensi.

Saat ini pegawai Kantor MenPPN/Bappenas tercatat berjumlah 948 orang. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural adalah 305 orang, yang terdiri dari 19 orang eselon I, 55 orang eselon II, 90 orang eselon III, dan 141 orang eselon IV. Sisanya, sebanyak 643 orang merupakan staf perencana (152 orang), tenaga tata usaha (241 orang), pengemudi (104 orang), pramubakti (96 orang) dan keamanan (50 orang).

Mengingat terbatasnya jumlah jabatan struktural eselon I dan II, dan untuk meningkatkan pengembangan profesionalisme tenaga perencana dan kualitas perencanaan, kami telah menyelenggarakan jabatan fungsional perencana, yang ketetapanannya sedang diproses bersama Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. (Draft SK tentang Jabatan Fungsional Perencana tersebut telah disampaikan kepada Kantor Men PAN). Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana tersebut akan diberlakukan bagi seluruh lembaga perencanaan, baik pada kantor pusat maupun daerah.

Menurut golongan dan tingkat pendidikan pegawai Kantor Men PPN/Bappenas terdiri dari 106 orang Golongan IV, 392 orang Golongan III, 270 orang Golongan II, dan 180 orang Golongan I. Dari jumlah tersebut yang mempunyai latar belakang pendidikan sarjana berjumlah 449 orang (47%), di antaranya S3 berjumlah 50 orang (11% dari sarjana), S2 sebanyak 142 orang (32%), S1 sebanyak 257 orang (57%). Dewasa ini di Bappenas dalam berbagai jabatan ada 11 orang Guru Besar. Selanjutnya yang berkualifikasi D3 ada 32 orang

(3,4%), tamatan SLTA 293 orang (31%), SLTP 75 orang (7,9%), dan SD 99 orang (10,5%). Dari gambaran tersebut tampak bahwa organisasi Bappenas lebih berbobot ke atas.

3. Dalam rangka pelaksanaan fungsi perencanaan, agenda kegiatan penyusunan rencana pembangunan kami bedakan menurut luas lingkup dan jangka waktunya, yaitu rencana pembangunan jangka menengah berupa repelita; dan rencana jangka pendek berupa rencana pembangunan tahunan yang kemudian dituangkan sebagai bagian dari RAPBN.

Dalam proses penyusunan repelita, Bappenas berpedoman pada arah kebijaksanaan yang ditetapkan dalam GBHN, dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan berbagai kegiatan lainnya yang menunjang seperti pengumpulan data dan informasi, serta berkonsultasi dengan departemen/LPND, pemerintah daerah, kalangan universitas serta kelompok-kelompok masyarakat. Rancangan repelita tersebut kemudian disampaikan kepada DPR untuk memperoleh tanggapan dan saran-saran penyempurnaan, untuk kemudian ditetapkan oleh Bapak Presiden dengan Keputusan Presiden.

4. Penyusunan rencana tahunan (penyiapan RAPBN, khususnya anggaran pembangunan) yang merupakan salah satu kegiatan di antara sekian banyak kegiatan yang bersifat operasional, kami lakukan dalam proses perencanaan yang berlangsung sepanjang tahun, yakni dalam wadah Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan di daerah dan pusat, yang merupakan perpaduan antara *bottom-up* dan *top-down planning*.
5. Rapat koordinasi pembangunan dari bawah ke atas terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah rapat koordinasi tingkat desa (musyawarah atau rembug desa) yang dikoordinasikan oleh LKMD setempat. Hasil rapat koordinasi ini kemudian dibawa untuk dibahas lagi dalam rapat koordinasi tingkat kecamatan (temu karya kecamatan). Selanjutnya diselenggarakan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Tingkat II di ibukota kabupaten. Dalam Rakorbang Tingkat II, secara fungsional Bappeda Tingkat II mengkoordinasikan seluruh proyek dan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerahnya dengan melibatkan seluruh dinas yang ada di daerah tersebut.

Hasil Rakorbang Tingkat II dibahas pada pertemuan Rakorbang Tingkat I. Dalam rakorbang ini semua usulan dari Rakorbang Tingkat II yang berada di daerah tingkat I yang bersangkutan dibahas secara mendalam. Dalam Rakorbang Tingkat I tersebut turut serta dinas-dinas vertikal maupun otonom, dan dihadiri juga oleh wakil-wakil dari pemerintah pusat, termasuk wakil-wakil dari Bappenas.

Usulan-usulan proyek yang dibahas dalam Rakorbang Tingkat I, khususnya yang diperkirakan mempunyai kaitan dengan daerah tingkat I lainnya, sebelum diajukan ke pusat terlebih dulu dibahas pada suatu rapat koordinasi lainnya yang disebut Pertemuan Konsultasi Regional (Konreg). Pertemuan ini lebih bersifat konsultatif antarbeberapa datu I yang berdekatan dan merasa memiliki kepentingan atau masalah yang sama. Seluruh wilayah Republik Indonesia dikelompokkan ke dalam lima kelompok wilayah : (1) Kelompok Wilayah A, yang meliputi wilayah Sumatera, (2) Kelompok Wilayah B, yang meliputi Jawa dan Bali, (3) Kelompok Wilayah C, yang meliputi Kalimantan, (4) Kelompok Wilayah D, meliputi Sulawesi, dan (5) Kelompok E, yang meliputi wilayah Timur lainnya.

Tahap terakhir dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah Konsultasi Nasional Pembangunan (Konasbang) yang setiap tahun diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Bappenas bersama-sama dengan Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Untuk penyusunan RAPBN tahun anggaran 1998/99 pertemuan Konasbang ini sekarang sedang berlangsung, yakni dari tanggal 27 Oktober s.d. 1 November 1997 di Bappenas.

Peserta Konasbang adalah seluruh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, di dampingi oleh ketua Bappeda masing-masing dan stafnya, dan dari pusat adalah para Sekjen atau Dirjen Departemen Teknis dan pejabat eselon I dari LPND beserta stafnya. Dalam Konasbang ini dibahas kebijaksanaan dan usulan-usulan proyek secara tuntas sebagai rangkuman pertemuan-pertemuan sebelumnya (Rakorbang tingkat I dan Konreg). Hanya proyek-proyek yang disepakati dalam Konasbang dapat diusulkan dalam DUP. Dengan demikian tidak ada

satu pun proyek pembangunan yang tidak diketahui dan disetujui oleh Gubernur/Pemerintah Daerahnya.

6. Setelah seluruh tahap pertemuan koordinasi pembangunan tersebut di atas selesai, dan atas dasar hasil yang diperoleh dalam Konasbang, mulailah masing-masing departemen/LPND dan Bappeda tingkat I menyiapkan daftar usulan proyek (DUP) untuk disampaikan kepada Bappenas. Rujukan utama yang digunakan oleh para petugas di Bappenas untuk menilai DUP-DUP tersebut adalah repelita dan Sasaran Repelita Tahunan (Sarlita) yang sudah harus dimiliki oleh setiap departemen/ lembaga dan daerah, serta laporan hasil-hasil pelaksanaan tahun sebelumnya.
7. Hasil pembahasan DUP tersebut kami jadikan bahan masukan pula bagi penetapan jumlah anggaran (plafon) yang diperlukan untuk 1 tahun anggaran. Penyusunan rancangan alokasi anggaran pembangunan dilaksanakan bekerjasama dengan Departemen Keuangan, dalam menyusun kerangka makro-nya. Artinya berapa besar kemampuan penerimaan dalam negeri, berapa banyak bantuan yang kita harapkan dari luar negeri, yang terkait dengan pertimbangan-pertimbangan moneter terutama neraca pembayaran. Setelah dikonsultasikan dengan Menko EKKU dan Wasbang, dan dilaporkan kepada Bapak Presiden, proses penyusunan anggaran ini mencapai puncaknya dan berakhir pada Sidang Kabinet Paripurna pada bulan Desember tahun yang bersangkutan.

Atas dasar inilah kemudian diberitahukan kepada seluruh pimpinan departemen/LPND besarnya alokasi anggaran pembangunan yang akan diperoleh masing-masing departemen/LPND dalam bentuk Satuan 2 yang dijabarkan ke dalam sektor, subsektor dan program.

8. Keseluruhan proses perencanaan tersebut kami perlihatkan pada gambar dan bagan berikut ini.
9. Dalam rangka memperoleh bantuan luar negeri upayanya ditempuh terutama melalui forum *Consultative Group on Indonesia (CGI)* untuk hibah dan pinjaman bersyarat lunak. Di samping itu, untuk keperluan-keperluan tertentu juga diupayakan pinjaman lunak dan fasilitas kredit ekspor di luar yang telah disepakati dalam sidang CGI.

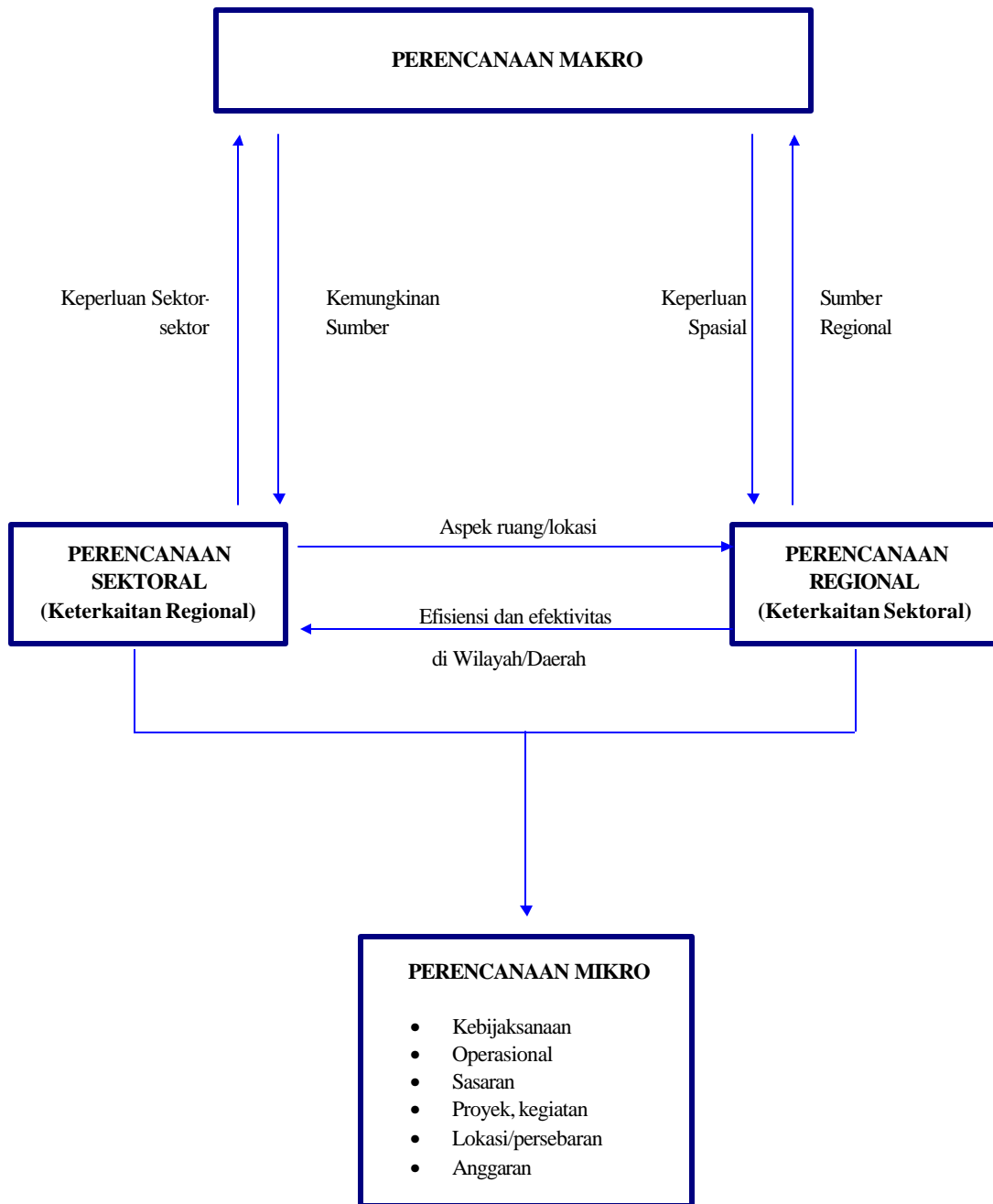
Dalam melaksanakan tugas tersebut kami bersama-sama dengan instansi-instansi teknis, Bappenas menyusun program/daftar proyek-proyek pembangunan yang direncanakan untuk dibiayai dari dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri ke dalam suatu Daftar Rencana Pinjaman Hibah Luar Negeri (DRPHLN), yang lebih dikenal sebagai Buku Biru (Blue Book).

Setelah penyusunannya selesai, Buku Biru tersebut kami bagikan kepada seluruh departemen/LPND, Kedutaan Besar negara peserta CGI, lembaga keuangan internasional, perwakilan Indonesia di luar negeri dan para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I serta Bappeda tingkat I.

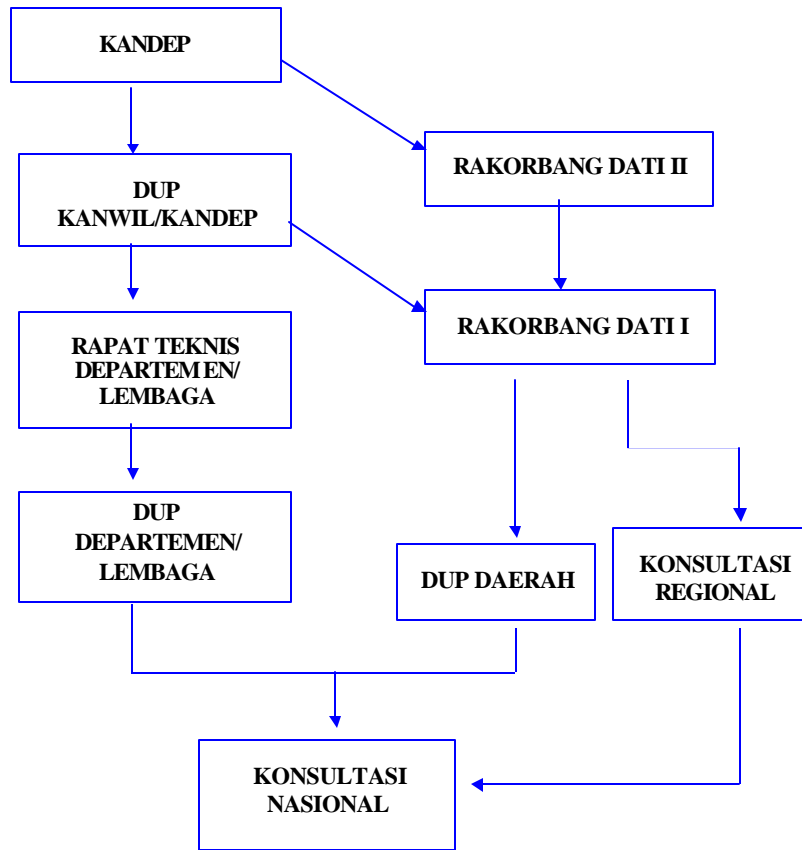
Buku Biru tersebut merupakan daftar proyek yang secara resmi memperoleh prioritas untuk memperoleh bantuan luar negeri. Kepada lembaga/negara calon pemberi pinjaman/hibah dipersilahkan memilih di antara proyek-proyek yang terdapat dalam Buku Biru tersebut.

Selain itu dari Buku Biru itu pula diambil proyek-proyek yang secara proaktif diusulkan oleh Pemerintah kepada lembaga/negara pemberi bantuan. Untuk mendukung pengusulan ke calon pemberi pinjaman/hibah, dilakukan koordinasi penilaian kelayakan proyek dengan instansi terkait, dan hasilnya dituangkan ke dalam laporan penilaian kelayakan proyek.

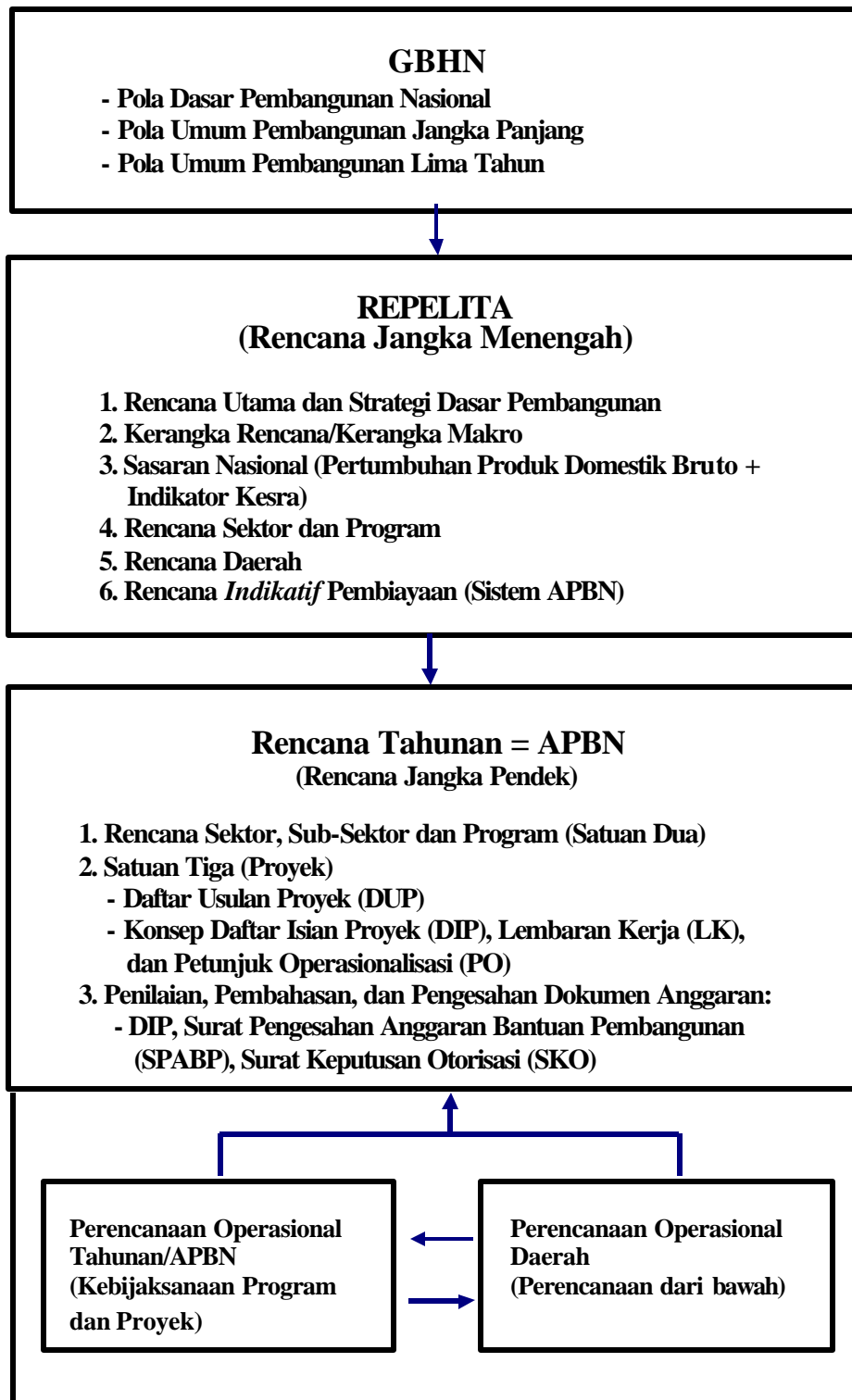
Gambar 1
KOORDINASI PERENCANAAN



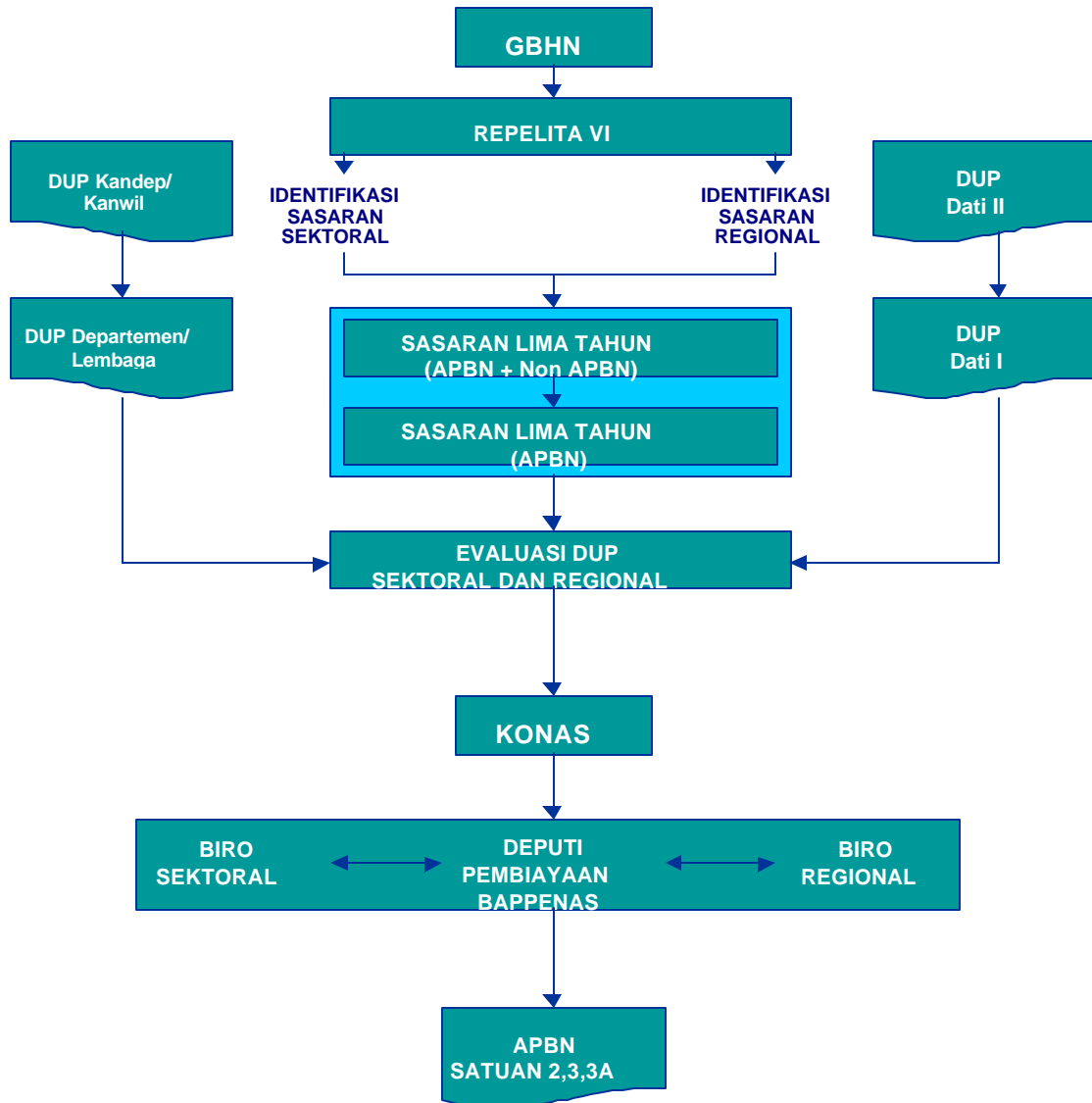
Gambar 2
KEGIATAN PERENCANAAN TAHUNAN



Gambar 3
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Gambar 4
PROSES PENILAIAN DUP



10. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas pembangunan, dilakukan penyempurnaan prosedur dan mekanisme perencanaan pembangunan, khususnya dengan menjabarkan Sasaran Repelita Tahunan (Sarlita). Upaya tersebut sudah dimulai sejak awal Repelita VI, dan mulai tahun anggaran 1995/96 Sarlita telah menjadi pegangan utama dalam penyusunan rencana tahunan. Proyek pembangunan, yang dituangkan dalam DIP harus memenuhi Sarlita. Dengan demikian penyusunan DIP bukan hanya kegiatan administratif dan menjadi rutin, tetapi sungguh merupakan kegiatan perencanaan, yang terarah kepada pencapaian suatu sasaran. Proses penilaian DUP atau penyusunan DIP dan letak strategis dari Sarlita kami tunjukkan dalam gambar 4 berikut. Dengan demikian diharapkan proses penyusunan dan penilaian rencana kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah akan menjadi lebih transparan dan terarah.

11. Dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, seringkali terjadi hal-hal di luar dugaan yang mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian-penyesuaian atau revisi terhadap proyek tersebut. Hal-hal yang di luar dugaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari berkurangnya anggaran atau dapat juga bertambahnya anggaran, terjadinya kenaikan harga satuan, kekeliruan lokasi, terjadinya bencana alam, kesalahan desain, atau terjadinya perubahan mekanisme penyaluran dana luar negeri. Atau juga dapat karena berkembangnya atau bergesernya prioritas. Akibatnya diperlukan revisi DIP. Revisi DIP ini merupakan kegiatan yang ditangani Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran.

Dalam keadaan normal, pemrosesan usulan revisi DIP, mulai dari diterimanya surat usulan sampai dengan persetujuan dari Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran memerlukan waktu kurang lebih 2 (dua) minggu, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, bisa lebih cepat.

12. Pada tahun anggaran 1997/98 terjadi revisi DIP yang dapat dikatakan luar biasa, disebabkan terjadinya gejolak moneter yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pembangunan kita. Dalam rangka menanggulangi dampak gejolak moneter tersebut, dengan Keppres No.39 Tahun 1997 ditetapkan penangguhan/pengkajian kembali berbagai proyek pemerintah, BUMN, dan swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/BUMN. Proyek Pemerintah yang ditangguhkan berjumlah 3.277 proyek, dengan nilai ±Rp 3,2 triliun.

Adapun jumlah proyek non-APBN yang ditangguhkan berdasarkan Keppres 39/1997 tersebut adalah 81 proyek dengan total biaya Rp 49.565,4 milyar; jumlah proyek yang dikaji kembali adalah 75 proyek dengan total biaya Rp 61.624,2 milyar; sedangkan proyek yang diteruskan berjumlah 85 proyek dengan total biaya Rp 67.607,3 milyar.

13. Agar kegiatan pembangunan, baik yang dibiayai oleh dana rupiah murni maupun dana bantuan/pinjaman luar negeri, dapat diikuti perkembangannya dan secara dini dapat dideteksi kekurangan dan kelemahannya sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien, efektif dan terarah pada sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan pembangunan yang ingin dicapai, diupayakan pengembangan sistem pemantauan dan pelaporan yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan proyek yang dilaksanakan oleh berbagai instansi secara cepat, lengkap dan cermat. Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang tahun.

Dalam hubungan ini, secara fungsional pemantauan dan pengendalian pelaksanaan proyek pembangunan dilakukan oleh departemen/LPND yang bersangkutan sendiri. Pemantauan atas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh Bappenas dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada departemen/ LPND yang bersangkutan agar secepatnya dapat diambil langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Sistem pemantauan dan pelaporan pelaksanaan proyek pembangunan tersebut dikembangkan berdasarkan pada Keppres No. 16 Tahun 1994.

Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan realisasi penyerapan dana proyek-proyek pembangunan yang dibiayai melalui APBN rupiah murni berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

14. Selain itu juga dilakukan pemantauan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dengan dana bantuan luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemakaian dana bantuan luar negeri tersebut serta untuk menghindari terjadinya hambatan dalam penyerapan dana (*disbursement*).

Penyerapan dana bantuan luar negeri secara rinci kami tuangkan dalam buku Laporan Penyerapan Bantuan Luar Negeri yang diterbitkan secara triwulanan. Laporan tersebut memuat antara lain tingkat penyerapan serta permasalahan pelaksanaan masing-masing proyek berbantuan luar negeri oleh departemen/lembaga pelaksananya.

15. Penetapan keputusan pemenang untuk pemilihan langsung proyek seharga di atas Rp 5,0 milyar dan pelelangan proyek seharga di atas Rp 10,0 milyar diharuskan mendapat persetujuan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, atas dasar Keputusan Presiden RI Nomor: 6 tahun 1995, tanggal 2 Pebruari 1995 tentang Tim Evaluasi Pengadaan (TEP).

Kelompok Kerja Teknis (KKT) dan sekretariat Pelaksana Harian TEP berkedudukan di kantor Bappenas. Proses evaluasi yang diajukan instansi pelaksana, dilakukan oleh Kelompok Kerja Teknis yang dipimpin oleh Wakil Ketua II/Pelaksana Harian TEP yaitu Wakil Ketua Bappenas. Anggota kelompok kerja teknis ditetapkan dengan SK Menko Ekku Wasbang selaku Ketua TEP, dan keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat dari Bappenas, BPPT, BPKP, dan Deperindag.

Seluruh proses pengadaan dilaksanakan oleh instansi pelaksana sampai pada usulan penetapan pemenang lelang/pemilihan langsung, yang selanjutnya diajukan kepada tim evaluasi. Terdapat 3 macam keputusan tim : (1) Disetujui; (2) Disetujui dengan beberapa catatan; (3) Dikembalikan.

Hasil evaluasi pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut dilaporkan secara 3 bulanan dan laporan lengkap secara tahunan, disampaikan langsung kepada Bapak Presiden RI.

16. Dalam upaya penyempurnaan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program/proyek pembangunan dilakukan evaluasi kinerja proyek pembangunan, yaitu yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi mengenai hasil, manfaat dan dampak proyek pembangunan yang telah direncanakan, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan tujuannya. Evaluasi ini dilaksanakan dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, atau hasil kajian yang lengkap melalui suatu studi evaluasi.

Dalam hubungan ini tidak semua proyek dilakukan evaluasi. Kriteria proyek yang dievaluasi selain dari besarnya alokasi dana yang dituangkan dalam DIP, juga didasarkan pada (a) pentingnya proyek ditinjau dari segi manfaat dan dampaknya; (b) kelengkapan data proyek yang akan dievaluasi; (c) tingkat kesiapan tenaga, metodologi dan dana untuk pelaksanaan studi evaluasi; (d) waktu pelaksanaan evaluasi; dan (e) tingkat transparansi dalam laporan.

17. Di samping mengelola kegiatan-kegiatan tersebut di atas, Bappenas juga mengelola program/proyek yang bersifat khusus, di antaranya adalah program Inpres Desa Tertinggal (IDT), program tata ruang, dan program pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan.

- a. Program IDT dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat lapisan bawah dengan memberikan bantuan modal dan pendampingan. Program IDT telah berhasil mendorong peningkatan kemampuan penduduk miskin untuk berusaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka. Hal ini sekaligus menunjukkan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat lapisan bawah sehingga tidak lagi terbelenggu lilitan kemiskinan. Dalam jangka panjang upaya ini akan mengurangi kesenjangan ekonomi antara lapisan bawah dan lapisan atas.

Dalam rangka membebaskan desa-desa tertinggal dari keteringgalan karena kurangnya prasarana fisik, dikembangkan program pembangunan prasarana perdesaan yang diarahkan pada desa-desa tertinggal untuk membuka keterisolasian desa, untuk

memperlancar pemasaran hasil usaha mereka, serta memenuhi kebutuhan masyarakat seperti air bersih.

Perkembangan pelaksanaan program IDT sampai dengan September 1997 kami laporkan pada halaman 71 s.d. 74 dalam Bahan Kunjungan Kerja yang telah kami sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden.

- b. GBHN 1993 menggariskan bahwa perencanaan pembangunan nasional didasarkan pada pola tata ruang nasional agar ruang wilayah nasional dan sumber daya di dalamnya dapat digunakan secara tertib, aman, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Dalam mengkoordinasikan penataan ruang dengan Keppres Nomor 75 Tahun 1993 dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional yang diketuai oleh Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas. Dalam rangka pelaksanaan undang-undang tersebut, telah diselesaikan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang dalam proses di Sekretariat Kabinet. Berbagai peraturan perundangan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 24 tahun 1992 tersebut, sedang dalam penyelesaian.
- c. Dalam rangka mengembangkan, tenaga profesional di bidang perencanaan pembangunan telah dikembangkan kegiatan diklat khusus di bidang perencanaan pembangunan. Program diklat tersebut dibiayai dengan sumber dana World Bank dan OECF, yang mencakup program Doktor bagi 25 orang; 148 orang program Master; 30 orang program Fresh S1; 10 orang Master Links, dan 370 orang untuk program jangka pendek. Sedangkan diklat dalam negeri dialokasikan untuk 99 orang program Master, dan 1.865 orang untuk program jangka pendek. Program ini diikuti oleh peserta dari berbagai instansi baik dari pusat maupun daerah.

Dalam pada itu sejak tahun 1991 Bappenas bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Hasanuddin telah menyelenggarakan program diklat jangka pendek dengan nama Teknik Manajemen Perencanaan Pembangunan (TMPP) Tingkat Dasar. Sampai dengan bulan September 1997 peserta yang telah mengikuti Diklat TMPP tersebut berjumlah 1.937 orang, dari Bappeda Tingkat II seluruh Indonesia.

Khusus untuk perencanaan dan pendayagunaan dana luar negeri untuk diklat yang lebih luas, dibentuk suatu tim yang dinamakan Tim Koordinasi Perencanaan Pendayagunaan Dana Luar Negeri untuk Pendidikan dan Pelatihan, disingkat Timkorrenda Diklat, yaitu suatu organisasi nonstruktural antar departemen yang pimpinan dan sekretariatnya berada di Bappenas. Timkorrenda Diklat ini melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan untuk proyek Professional Human Resource Development (PHRD) yang dibiayai oleh dana World Bank dan OECF.

- d. Selain itu, Bappenas ditugasi pula untuk mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Irian Jaya agar dapat dilaksanakan secara terpadu, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, SDM serta potensi swasta dalam membangun Irian Jaya.
- e. Selain penanganan pembangunan di Irian Jaya, untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna pembangunan Timor Timur, sejak tahun 1995/96 Bappenas juga melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Propinsi Timor Timur.
- f. Bappenas juga terlibat secara langsung dalam Dewan Pengembangan KTI yang dibentuk dengan Keppres No. 120 Tahun 1993, yang kemudian disempurnakan dengan Keppres No. 27 Tahun 1994. Sekretariat Tim tersebut berada di Bappenas. Untuk kelancaran tugas Dewan KTI ini, digunakan satuan kerja di lingkungan Bappenas yang secara fungsional membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan Dewan. Penjabaran lebih lanjut kebijakan dan strategi pembangunan di kawasan timur Indonesia dan

propinsi lainnya ke dalam rencana dan program yang lebih rinci, juga dilaksanakan secara fungsional oleh Bappenas.

18. Bappenas juga melakukan kegiatan yang berlangsung setiap tahun yaitu menyiapkan Lampiran Pidato Presiden/Mandataris MPR, pidato kenegaraan pada setiap tanggal 16 Agustus di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di samping menyiapkan lampiran pidato kenegaraan 16 Agustus, Bappenas setiap akhir tahun menyiapkan bahan keterangan pemerintah tentang Rancangan Anggaran dan Belanja Negara yang dibawakan oleh Bapak Presiden pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.

19. Seperti halnya instansi pemerintah lainnya, beberapa kali setiap tahun Bappenas mengadakan rapat kerja dengan DPR, baik setelah pemerintah menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN, maupun pada waktu rapat kerja dengan DPR setelah para anggota Dewan melaksanakan peninjauan ke daerah-daerah. Selain itu, secara reguler pertemuan juga dilakukan dengan Komisi-komisi tertentu di DPR, khususnya dengan Komisi X dan Komisi APBN.

20. Dalam hal pengawasan, pengembangan sistem pengawasan internal dilakukan dalam rangka pendayagunaan sistem pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat atas keseluruhan unsur organisasi, manajemen, dan staf Bappenas. Pengembangan Waskat dan Wasnal diarahkan pada pemantapan sistem organisasi dan manajemen aparatur Bappenas.

Waskat di Bappenas telah berjalan dengan baik dan sampai sekarang kami tidak menemukan masalah.

Mengenai pengawasan fungsional, aparat pengawasan intern Bappenas sebagai LPND berada di Kantor Mensesneg yakni pada Asisten Pengawasan lembaga- lembaga Non-Departemen (ASWAS) yang tugas dan fungsinya sama dengan Inspektorat Jenderal. Di lingkungan Bappenas sendiri ada Asisten Meneg PPN/Ketua Bappenas. Pelaksanaan Wasnal ini setiap tahunnya berjalan dengan tertib dan lancar. Dalam tahun anggaran 1997/98 di Bappenas, sejak tanggal 9 Juni 1997 dan direncanakan akan selesai pada pertengahan bulan Oktober 1997, sedang dilakukan pemeriksaan serentak untuk pelaksanaan proyek tahun anggaran 1996/1997 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Aswas.

Mengenai pengawasan masyarakat sejak tahun 1994/95 s.d. 19 September 1997, Bappenas telah menerima 12 (dua belas) buah laporan/pengaduan masyarakat yang meliputi masalah antara lain lingkungan hidup, penyalahgunaan wewenang, kepegawaian, dan tata laksana pemerintah. Dari 12 buah laporan pengaduan masyarakat tersebut telah diselesaikan 3 buah laporan/pengaduan yaitu 1 (satu) buah masalah kepegawaian dan 2 (dua) buah masalah penyalahgunaan wewenang; yang kesemuanya itu ternyata terbukti tidak mengandung kebenaran.

Sedangkan 9 (sembilan) buah laporan/pengaduan masyarakat masih dalam proses penelitian yang meliputi 3 (tiga) masalah penyalahgunaan wewenang, 4 masalah tata laksana pemerintah, 1 (satu) masalah lingkungan hidup, dan 1 (satu) buah masalah kepegawaian.

Dalam pada itu, kami juga menerima beberapa surat kaleng (anonim) yang disampaikan langsung kepada pimpinan Bappenas. Meskipun surat kaleng, juga dilakukan penelitian dan apabila dari informasi yang disampaikan memang benar adanya penyimpangan akan segera diambil langkah-langkah seperlunya. Namun pada kurun waktu tersebut pengaduan dalam surat-surat kaleng tersebut ternyata sulit untuk dibuktikan. Namun, informasi tersebut cukup bermanfaat dan berguna sebagai peringatan bagi aparat kami, bahwa perilaku para pejabat senantiasa diikuti oleh lingkungan dan masyarakatnya.

21. Mengenai masalah yang dihadapi, pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan instansi lain. Kekurangan ruangan kerja sekarang sedang diupayakan untuk dipenuhi. SDM terus kami tingkatkan, bukan jumlahnya, tetapi kualitasnya. Kami masih menunggu ketetapan mengenai

jabatan fungsional perencana. Lain-lainnya, kami kira adalah masalah yang biasa dihadapi oleh instansi pemerintah, seperti kekurangan dana, prasarana dan sarana.

Demikianlah, laporan kami, kiranya Bapak Wakil Presiden memakluminya.